



Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No.2, Desember 2017

DEMOKRASI, HAM DAN MILITER

- Fenomena *Post Democracy Party* di Indonesia: Kajian atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya
- Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM
- Polisi Sipil (*Civilian Police*) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian
- Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu
- Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan
- Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia
- Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan *Islamic State* di Indonesia

RESUME PENELITIAN

- Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal
- Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- *Taking Religion more Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia*



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Ratna Shofi Inayati, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710

Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com

Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i–ii
Catatan Redaksi	iii–iv
Artikel	
• Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya <i>Firman Noor</i>	109–125
• Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM <i>Sri Yanuarti</i>	127–147
• Polisi Sipil (Civilian Police) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian <i>Sarah Nuraini Siregar</i>	149–164
• Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahanan di Laut Sulawesi – Laut Sulu <i>Ismah Rustam</i>	165–181
• Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan <i>Deasy Silvya Sari</i>	183–196
• Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia <i>Diandra Megaputri Mengko</i>	197–208
• Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>Yustina Trihoni Nalesti Dewi</i>	209–226
• Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia <i>Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti</i>	227–242
 Resume Penelitian	
• Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal <i>Atika Nur Kusumaningtyas, dkk</i>	243–264
• Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi <i>Aisah Putri Budiatri, dkk</i>	265–279
 Review Buku	
• <i>Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia</i> <i>Gde Dwitya Arief Metera</i>	281–288
 Tentang Penulis	289–290
Pedoman Penulisan	291–295

CATATAN REDAKSI

Reformasi menjadi jembatan perubahan kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade reformasi, nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek hak asasi manusia dan militer.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Demokrasi, HAM dan militer. Artikel pertama yang ditulis oleh Firman Noor, **”Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya”**, memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal.

Artikel berikutnya, **“Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM”**. Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas mengenai Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratik. Tulisan ini juga membahas mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di Indonesia.

Persoalan reformasi Polri juga menjadi bagian yang dibahas pada edisi ini dalam artikel **“Polisi Sipil (Civilian Police) dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian”** yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika

yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Sementara itu, artikel **“Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu”** yang ditulis oleh Ismah Rustam. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.

Artikel selanjutnya membahas tentang **“Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan”** yang ditulis oleh Deasy Silvia Sari. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M. Mengko berjudul **“Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia”** membahas mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Persoalan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dengan judul **“Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia”**. Artikel ini menguraikan perlunya pemberahan perlindungan saksi

terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM. Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti dengan judul **“Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh Gerakan Islamic State Di Indonesia”**. Artikel ini membahas mengenai perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas, **“Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal”**. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokrasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya

Naskah kedua, **“Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”**, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Veri R. Hadiz dengan judul **“Islamic Populism in Indonesia and the Middle East”** dan Michael Buehler berjudul **“The Politics of Sharia Law: Islamic Activist and the State in Democratizing Indonesia”** yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief Metera. Dua publikasi ini telah memajukan literatur tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai Perkembangan Demokrasi, HAM dan militer.

Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 321.8

Firman Noor

FENOMENA *POST DEMOCRACY PARTY* DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN DAMPAKNYA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

DDC: 355.00092

Sri Yanuarti

PENGAWASAN INTELIJEN DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 127-147

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratik menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau *imunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari

kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih diintujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kata Kunci: Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

**POLISI SIPIL (CIVILLIAN POLICE)
DALAM REFORMASI POLRI:
UPAYA & DILEMA ANTARA
PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI
KEPOLISIAN**

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164**

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

DDC: 320.12
Ismah Rustam

**KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM
DI PERBATASAN INDONESIA : KASUS
KEJAHATAN DI LAUT SULAWESI –
LAUT SULU**

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 165-181**

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan territorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.

Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial

DDC: 959.164
Deasy Silvya Sari

**POROS MARITIM DAN TANTANGAN
LAUT TIONGKOK SELATAN**

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 183-196**

Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan *Fiery Cross Reef* seluas 3.000m², Vietnam yang mengembangkan *Spratly Island* seluas 550 m², Malaysia yang mengembangkan *Swallow Reef* seluas 1.368m², Filipina yang mengembangkan *Thitu Island* seluas 1.000m², dan Taiwan yang mengembangkan *Itu Aba* seluas 1.195m². Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi ekslusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi *outward looking* dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.

Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, *Regional Security Complex Theory* (RSCT),

DDC: 363.3
Diandra Megaputri Mengko

PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontraproduktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme

DDC: 362.8
Yustina Trihoni Nalesti Dewi

PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 209-226

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat

penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pemberahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

DDC: 363.3

**Novie Lucky Andriyani dan Feriana
Kushindarti**

RESPON PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DAN PENGARUH GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 227-242

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militer di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel

ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan barbarnya, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.

Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

PEREMPUAN KEPALA DAERAH DALAM JEJARING OLIGARKI LOKAL

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan kedunya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

Kata Kunci: perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.

DDC: 324.2598
Aisah Putri Budiatri

**FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL
PARTAI-PARTAI POLITIK
DI INDONESIA ERA REFORMASI**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279

Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Kata Kunci: Faksi, Partai Politik, Konflik, Reformasi

DDC: 297.272
Gde Dwitya Arief Metera

**MELIHAT AGAMA SECARA LEBIH
SERIUS: MELAMPAUI ASUMSI
SEKULAR DALAM MENELITI AGAMA
DAN POLITIK DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 281-288

Review ini membedah dua buku penting dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul masing-masing Islamic Populism in Indonesian

and the Middle East dan The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia. Dua publikasi ini telah memajukan literature tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indicator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Kata kunci: Politik kaum Islamis, Politik Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia, Demokratisasi.

DDC: 321.8

Firman Noor

THE POST DEMOCRACY PARTY PHENOMENON IN INDONESIA: A STUDY ON THE BACKGROUNDS, CHARACTERISTICS, AND IMPACTS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 109-125

In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch's analytical framework, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a "post democracy party". In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party's characteristic are relevant and becoming parties' characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties' involvement in the real political life.

Keywords: Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation.

DDC: 355.00092

Sri Yanuarti

DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION AS INSTRUMENTS PREVENTION OF VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 127-147

One of the causes of human rights violations committed by state institutions is the absence of democratic intelligence oversight. Especially in countries in transition from authoritarian regimes to democratic regimes, democratic oversight of intelligence institutions is imperative. This is because, the intelligence institutions of the past (authoritarian regimes) usually serve to protect the authoritarian leader or become a repressive tool for his society. As a result; (1) Intelligence institutions serve more political interests than policy-making; (2) The established intelligence unit is intended for a particular political purpose; (3) Intelligence officers or intelligence policies are directed, governed by political interests, or political parties, affiliated with intelligence agencies.

In Indonesia democratic oversight of intelligence is important as the history of intelligence in the past has been widely misused to protect the existing regime, besides the practice of intelligence is also done freely because they have immunity rights under the pretext that the principle of intelligence work is confidentiality. In addition, the politicization of intelligence institutions in the past is very high

In the Soeharto era, the 'black' intelligence practice was explicitly pursued to deal with threats to political rulers. The focus of intelligence activities at the time was aimed at destroying communism in Indonesia. With the justification of these operations on a large scale

run. This continued for thirty years in which intelligence activities that justify human rights abuses are more aimed at addressing threats coming from within the country. The sequence of cases that occurred from military operations in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting case (Peter) in the 1980s, followed by cases of activist disappearance during 1997- 1998 show the dark face of intelligence that when it is used as an instrument for the ruler to perpetuate his power.

Keywords: Intelijen, Monitoring, Democracy, Human Rights Violations

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM: EFFORTS & DILEMMAS BETWEEN ENFORCING HUMAN RIGHTS AND POLICE FUNCTIONS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 149-164

Civilian Police is a major paradigm change for Polri. This change is not easy because when the police were still part of ABRI, this institution is full of militaristic and violent character. This paper will examine and analyze the function of the Police as a Civilian Police during the reform period within the scope of the Police Reform. This analysis will explain the problems faced by the Police, so that the position of Polri becomes dilemmatic; between carrying out its functions but has implications on the issue of human rights violations, or making strategic choices that can support the image of the Police in the corridor as Civilian Police.

Keywords: Civilian Police, Police Reform, human rights violations

DDC: 320.12
Ismah Rustam

MARITIME SECURITY POLICY IN INDONESIA'S BOUNDARY: CASES OF CRIMINAL IN SEA - SULU SEA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 165-181

This paper discusses the maritime security policy on the Sulawesi Sea - Sulu Sea which is often faced with crime issues especially hostage taking and hijacking. Though three countries; Indonesia, Malaysia and the Philippines have joint patrols in both waters but the crime rate in the region is still relatively high. The approach to be seen in this paper is the formation of a trilateral cooperation, in which the government needs to take a diplomatic approach and establish a binding cooperation regime. Indonesia as a country with significant territorial interests in the region must initiate follow-up of meetings that have been held between the three countries. Like the Malacca Strait, the sea channel of the Sulawesi Sea border - Sulu Sea includes a dangerous voyage route. The various regime initiatives in the Malacca Strait have reduced crime rates and increased the number of navigational safety. While in the border region of Sulawesi Sea - Sulu Sea has not seen the regime strong enough in marine security.

Keywords: maritime security, Sulawesi Sea - Sulu Sea, regime, territorial territory

DDC: 959.164
Deasy Silvya Sari

MARITIME NEXUS AND THE CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 183-196

The island reclamation race has been taking place in the South China Sea since fifteen years ago. The reclamation race was carried out by the governments of the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island reclamation will affect the exclusive economic zone (ZEE) of each ASEAN members, including Indonesia. Dispute resolution efforts have been sought both bilaterally and regionally. A series

of agreement have been done, but it have not been able to reduce the ego of disputed parties to stop reclamation. Moreover, the reclamation of the island accompanied the development and enhancement of military capability of each disputed country in terms of quantity and quality.

In the design of the World Maritime Nexus echoed by Indonesian Government as a maritime development plan, the Indonesian Government needs to set a strategy to offset the island reclamation and military capability. This paper intends to elaborate the strategy of Indonesian Maritime nexus in the face of island reclamation and military capability in the South China Sea. The author conducted a literature study to collect, analyze, and interpret datas, as well as to design the strategy of Indonesian Maritime nexus using Regional Security Complex Theory (RSCT). The Indonesian government needs to design an outward looking strategy in the design of the Indonesian Maritime nexus to counteract other countries' strategies that could threaten the resilience of the Unitary Republic of Indonesia, particularly in relation to the island reclamation and military capability in the South China Sea.

Keywords: Indonesia, Souths China Sea, Maritime Nexus, Regional Security Complex Theory (RSCT).

DDC: 363.3

Diandra Megaputri Mengko

MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-TERRORISM IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 197-208

Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI's authority (as main

role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNI's equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terrorism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesia's democratic life.

Keywords: Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

DDC: 362.8

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

STRENGTHENING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS ON THE HUMAN RIGHTS COURT

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 209-226

Indonesia's Human Rights Tribunal for East Timor, Tanjung Priok and Abepura who have handled 18 cases, are not credible because they contain many defects and weaknesses and deny humanitarian standards. One reason is that the Human Rights Court can not guarantee the protection of witnesses from threats and pressure. Whereas the protection of witnesses is particularly important in gross violations of human rights because perpetrators usually have the authority, power and resources to remove evidence, influence law enforcement officers or intimidate witnesses. Whereas witnesses are usually weak parties especially in power relations with defendants. This paper is intended to describe the need to improve the protection of witnesses, especially in the context of legislation to support its ability to contribute to the creation of a fair trial of the Human Rights Court.

Keywords: Human Right, Court, Victim

DDC: 363.3

**Novie Lucky Andriyani and Feriana
Kushindarti**

**GOVERNMENT RESPONSE IN DEALING
WITH THE DEVELOPMENT AND
INFLUENCE OF ISLAMIC STATE
MOVEMENT IN INDONESIA**

**Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 227-242**

The self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism.

Key words: Indonesia, influence, Islamic State, response

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

**FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL
OLIGARCHY NETWORK**

**Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 243-264**

Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.

Keywords: female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.

DDC: 324.2598

Aisah Putri Budiatri

**INTERNAL FACTION AND CONFLICTS
OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA
ERA REFORMATION**

**Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 265-279**

Internal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in the Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized

party coalitions, the ineffectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is essential.

Keywords: *Faction, Political Party, Conflict, Reformation*

DDC: 297.272

Gde Dwitya Arief Metera

**TAKING RELIGION MORE SERIOUSLY:
BEYOND SECULAR ASSUMPTION IN
STUDYING RELIGION AND POLITICS IN
INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 281-288

*This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz's *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, and Michael Buehler's *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Both publications have advanced*

the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler's book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz's book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.

Keywords: *Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari'a bylaws, Democratization.*

POROS MARITIM DAN TANTANGAN LAUT TIONGKOK SELATAN

MARITIME NEXUS AND THE CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA

Deasy Silvya Sari

Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
E-mail: deasy.silvya@unpad.ac.id

Diterima: 13 Oktober 2017; direvisi: 9 November 2017; disetujui: 29 Desember 2017

Abstract

The island reclamation race has been taking place in the South China Sea since fifteen years ago. The reclamation race was carried out by the governments of the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island reclamation will affect the exclusive economic zone (ZEE) of each ASEAN members, including Indonesia. Dispute resolution efforts have been sought both bilaterally and regionally. A series of agreement have been done, but it have not been able to reduce the ego of disputed parties to stop reclamation. Moreover, the reclamation of the island accompanied the development and enhancement of military capability of each disputed country in terms of quantity and quality.

In the design of the World Maritime Nexus echoed by Indonesian Government as a maritime development plan, the Indonesian Government needs to set a strategy to offset the island reclamation and military capability. This paper intends to elaborate the strategy of Indonesian Maritime nexus in the face of island reclamation and military capability in the South China Sea. The author conducted a literature study to collect, analyze, and interpret datas, as well as to design the strategy of Indonesian Maritime nexus using Regional Security Complex Theory (RSCT). The Indonesian government needs to design an outward looking strategy in the design of the Indonesian Maritime nexus to counteract other countries' strategies that could threaten the resilience of the Unitary Republic of Indonesia, particularly in relation to the island reclamation and military capability in the South China Sea.

Keywords: Indonesia, Souths China Sea, Maritime Nexus, Regional Security Complex Theory (RSCT).

Abstrak

Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan *Fiery Cross Reef* seluas 3.000m², Vietnam yang mengembangkan *Spratly Island* seluas 550 m², Malaysia yang mengembangkan *Swallow Reef* seluas 1.368m², Filipina yang mengembangkan *Thitu Island* seluas 1.000m², dan Taiwan yang mengembangkan *Itu Aba* seluas 1.195m². Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi ekslusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi *outward looking* dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-

negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.

Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, *Regional Security Complex Theory* (RSCT).

Pendahuluan

Perlombaan reklamasi pulau yang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan merupakan hal yang harus diwaspadai oleh Pemerintah Republik Indonesia menyangkut perluasan wilayah beberapa negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Reklamasi yang berlangsung memiliki hubungan timbal balik dengan perlombaan senjata dan kekuatan militer. Dalam desain Poros Maritim Dunia sebagai gagasan Pemerintah yang berkuasa sekarang mengelola wilayah laut negara Kesatuan Republik Indonesia, perlombaan reklamasi pulai di Laut Tiongkok Selatan harus pula mendapat porsi sehingga perencanaannya agar Pemerintah Indonesia tidak kecolongan terhadap aksi-aksi negara-negara yang berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan.

Dengan menggunakan pendekatan *Regional Security Complex Theory*, penulis berupaya untuk menyusun strategi menangkal arus reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan dalam desain Poros Maritim Indonesia, terutama strategi *outward looking*.

Regional Security Complex Theory (RSCT)

Regional Security Complex Theory (RSCT) merupakan kontribusi Buzan terhadap studi keamanan yang kini berkembang dalam Studi Hubungan Internasional dari sisi konsep relasi dalam kajian keamanan. Buzan memandang keamanan merupakan fenomena relasional. Karenanya, keamanan suatu negara tertentu tidak dapat dipahami tanpa memahami pola keamanan internasional yang berpengaruh terhadap independensi keamanan negara tersebut. Dalam peringkat analisa (*level of analysis*) studi Hubungan Internasional, pengaruh relasi ini terlihat dari level negara ke sistem internasional, atau level negara ke individu dalam pengaruh hubungan yang timbal balik. Pengertian *security complex* itu sendiri

adalah sebuah kelompok negara-negara yang umumnya memiliki kedekatan fokus hubungan keamanan nasional meliputi; karakter keamanan nasional, salingketergantungan dengan negara tetangga baik dalam bentuk rivalitas, maupun kepentingan bersama.¹

Dalam RSCT terdapat beberapa konsep penting yang dapat dipergunakan dalam menelaah mengenai keamanan di suatu kawasan. *Pertama*, konsep *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan) antar negara-negara yang dipengaruhi oleh ideologi, teritori, etnik, dan preseden sejarah. Sayangnya, *security complex*, cenderung diwarnai oleh permusuhan, dan relasi antar negara cenderung diwarnai oleh kecurigaan dan rasa takut.² *Kedua*, analisis RSCT mempertimbangkan distribusi *power*, meliputi kapabilitas militer, ekonomi, material, dan motivasional.³ Distribusi *power* dipengaruhi oleh persepsi negara tersebut.

RSCT dipergunakan dalam tulisan ini dengan mempertimbangkan, *pertama*, sengketa yang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah sengketa dalam lingkup geografis regional Asia Tenggara bagian utara. *Kedua*, isu yang dipersengketakan merupakan isu politik keamanan. *Ketiga*, kurun waktu sengketa yang sudah cukup lama, sehingga jalanan (*fabric*) permasalahan sudah kompleks, mulai dari permasalahan reklamasi, perlombaan kapabilitas militer dari sisi personil maupun peralatan guna mempertahankan klaim masing-masing, yang nantinya berimbang pada perluasan atau pengurangan luas wilayah negara-negara yang bersengketa. RSCT dipergunakan pula untuk menelaah pola *amity* dan *enmity* negara-negara yang bersengketa, perluasan aliansinya, serta postur *power* masing-masing pihak. Hasil

¹ Barry Buzan, “*People, State and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*”, dalam Poowin Bunyavejchewin, *A Regional Security Complex Analysis of the Preah Vihear Temple Conflict 1953-1962*. (Thailand: Walailak University. 2013), hlm. 15.

² *Ibid*, hlm.16.

³ *Ibid*

analisa RSCT mengenai sengketa di Laut Tiongkok Selatan akan diiriskan dengan konsep Poros Maritim sebagai kebijakan Indonesia dalam era pemerintahan Joko Widodo dalam pengembangan sektor kelautan.

Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Sengketa Laut Tiongkok Selatan telah menjadi pekerjaan rumah bagi beberapa negara di Asia Tenggara dalam dua hal, yakni klaim teritori dan perlombaan kapabilitas militer. Sengketa ini melibatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia atas wilayah perairan seluas 3.500.000 km², yang dikenal dengan Laut Tiongkok Selatan yang menjadi bagian dari Samudera Pasifik. Tidak heran jika kemudian, ada keterlibatan negara-negara yang berada dalam lingkar Pasifik, seperti Amerika Serikat dan Australia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan ini. Indonesia pun harus bersikap siaga jika sengketa tersebut merambah ke sebagian teritori NKRI, yakni di Kepulauan Natuna.

Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Di wilayah ini terdapat cadangan minyak sekitar 28 juta barel, cadangan gas alam seluas 7.500 km², dan ekosistem biohayati dunia satu pertiganya berada di wilayah ini. Laut Tiongkok Selatan juga menjadi lalu lintas perdagangan laut yang cukup penting dalam hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik dengan keberadaan tiga selat yang cukup ramai, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok.⁴

Klaim teritori yang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan didasarkan pada dua alasan utama, yakni: alasan wilayah penangkapan ikan tradisional yang sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu dan hukum Laut UNCLOS. Klaim ini mencuat ketika Tiongkok (atau China) mengemukakan doktrin "Nine Dash Line" atau "Zengmu Ansha"⁵ sebagai dasar klaim Tiongkok atas laut dan pulau-pulau yang berada di Laut Tiongkok Selatan sejak 1936.

⁴ Dudy Heryadi dkk. *Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan*. Laporan Akhir Penelitian Kelompok FISIP UNPAD, (Jatinangor: FISIP UNPAD, 2012), hlm. 3.

⁵ Mengenai istilah Zengmu Ansha, lihat penjelasannya dalam <http://thediplomat.com/2014/08/the-nine-dashed-line-engraved-in-our-hearts/>, diakses pada 27 September 2016.

Penulis menyatakan Zengmu Ansha sebagai doktrin karena rakyat dan Pemerintah RRT selain melakukan internalisasi peta tersebut kepada rakyat Tiongkok dengan paham wilayah penangkapan ikan tradisional Tiongkok. Oleh karena itu, jika pemerintah RRT menjadi agresif terhadap masalah Laut Tiongkok Selatan, hal tersebut dapat dipahami karena doktrin geopolitik Zengmu Ansha Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Internalisasi Zengmu Ansha terlihat dari pernyataan Shan Zhiqiang, Kepala Editor Majalah *China National Geography* di bawah ini:

"Nine dashed line telah dilukis di dalam hati dan pikiran orang China untuk waktu yang lama. Sudah 77 tahun sejak Bai Meichu memasukkan [nine dashed line] ke dalam peta tahun 1936. Sekarang terukir mendalam di hati dan pikiran orang-orang China. Saya tidak percaya pemimpin Cina akan menghapus Nine dashed line dari orang-orang China. Saya tidak percaya akan ada waktu ketika China akan tanpa Nine dashed line"

Gambaran sengketa atas klaim teritori yang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan terlihat di dalam gambar berikut ini:



Sumber: newshanter.com, diakses pada 24 Agustus 2016

Gambar 1. Sengketa Klaim Teritori di Laut Tiongkok Selatan

Doktrin Zengmu Ansha mengusik beberapa negara di Asia Tenggara karena doktrin tersebut mengambil wilayah negara, sumber daya alam di dalamnya, termasuk pergesekan di antara nelayan-nelayan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam di pulau maupun lautnya. Secara umum, klaim teritori yang berlangsung di antara di Laut Tiongkok Selatan meliputi klaim dari negara-negara berikut ini:⁶

1. Indonesia dan Tiongkok atas perairan Kepulauan Natuna;
2. Filipina, Tiongkok dan Taiwan atas lapangan gas Malampaya dan Camago;
3. Filipina, Tiongkok dan Taiwan atas Scarborough Shoal;
4. Vietnam, Tiongkok dan Taiwan atas perairan barat dari kepulauan Spratly. Konflik klaim di area ini melibatkan juga Brunei, Malaysia dan Filipina;
5. Kepulauan Paracel yang disengketakan antara Tiongkok dengan Vietnam; dan
6. Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam yang mengklaim area di Teluk Thailand.

Klaim pada dasarnya bersifat pencitraan pada masyarakat internasional. Klaim tidak akan berlaku tanpa adanya upaya nyata dari pihak yang mengajukan klaim. Sejauh ini telah berlangsung upaya-upaya mewujudkan klaim dalam bentuk reklamasi pantai beserta fasilitasnya dan juga pengamanan fasilitas pantai dari militer masing-masing negara. Kegiatan-kegiatan reklamasi yang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan yang dilakukan oleh Pemerintah RRT dan Vietnam, misalnya reklamasi di Kepulauan Spratly (Karang Mischief⁷ dan enam karang lainnya) oleh Pemerintah RRT menuai protes dari Filipina dan Vietnam. Salah satu gambaran reklamasi Pemerintah RRT terlihat dalam foto-foto di bawah ini:



Sumber: www.dunia.news.viva.co.id

Gambar 2. Reklamasi Pemerintah RRT di Laut Tiongkok Selatan

Reklamasi yang dilakukan pemerintah Vietnam terlihat dalam foto-foto di bawah ini:



Sumber: www.dunia.news.viva.co.id

Gambar 3. Reklamasi Sandy Cay oleh Pemerintah Vietnam

Data citra satelit menunjukkan perkembangan reklamasi di Laut Tiongkok Selatan antara lain:⁸

1. Reklamasi Republik Rakyat Tiongkok: Gaven Reef, Johnson Reef South, Hughes Reef, Cuarton Reef, Fiery Cross Reef, Mieschier Reef, West London Reef.
2. Vietnam: Pearson Reef, Sandy Cay, Sin Cowe Island, West Reef, Central Reef, Grierson Reef, Prince of Wales Bank, Alexandra Bank, Prince Consort bank, dan Vanguard Bank
3. Malaysia: Swallow Reef
4. Filipina: 8 pulau di Spratly, yang terbesar Thitu Island
5. Taiwan: Itu Aba Island

Efek reklamasi akan meningkatkan luas wilayah negara yang mengklaim pulau-pulau tersebut. Meski, definisi pulau tersebut akan

⁶ Dudy Heryadi, *op.cit.*, hlm. 4.

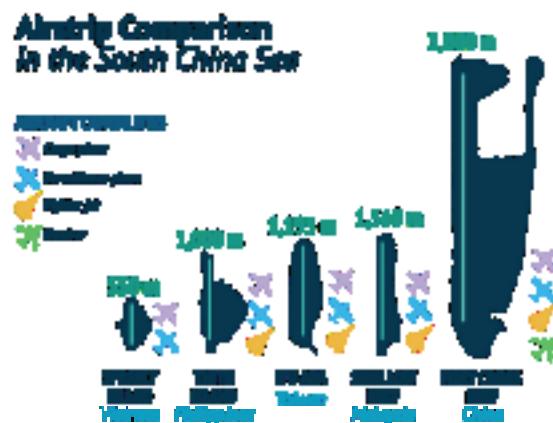
⁷ Nama karang Mieschier diambil dari nama pelaut Jerman, Heribert Mischief, seorang awak kapal Henry Spratly (1791) yang menemukan karang tersebut dalam rangkaian Kepulauan Spratly. Tiongkok menyebut Mieschier reef dengan nama 'Meiji', Filipina menyebutnya Karang Panganiban, dan Vietnam menyebutnya Karang Da Vanh Khan (www.dunia.news.viva.co.id, diakses pada 27 September 2016).

⁸ Chandra Widya Yuda, *Implementasi DoC dan Perundingan CoC di Laut Tiongkok Selatan*, (Jakarta: Direktorat Politik dan keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI. 2016), hlm.5.

dipertanyakan dari sisi hukum internasional, apakah reklamasi pulau yang sudah dilakukan dapat dikategorikan sebagai pulau buatan atau bukan. Merujuk pasal 60 ayat (8) UNCLOS, Jika dikategorikan sebagai pulau buatan, maka pulau yang direklamasi tidak akan memiliki status pulau tertentu. Tetapi, jika reklamasi dianggap sebagai okupasi (pendudukan, penggunaan dan penempatan tanah kosong), dan jika pemerintah negara yang bersebelahan tidak hirau maka kasus Sipadan Ligitan yang pernah berlangsung antara Indonesia dengan Malaysia, mungkin akan berulang dimana negara yang melakukan okupasi akan mendapatkan haknya atas pulau tersebut karena telah menggunakan dan memberi manfaat pada pulau tersebut dengan tidak membiarkan pulau tersebut menjadi terbengkalai.

Namun, ketika reklamasi pulau sudah dilakukan, hal yang lebih penting lagi adalah pemeliharaan pulau. Sehingga, penyediaan sarana, prasarana, pendudukan serta pengamanan menjadi strategi berikutnya bagi pemerintah yang melakukan okupasi. Pengamanan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga aset sekaligus memperlihatkan kepada negara-negara tetangga akan keseriusan klaim teritori. Militer cenderung dilibatkan dalam proses pengamanan tersebut. Pelibatan militer untuk mengamankan teritori oleh negara-negara yang terlibat sengketa telah dilakukan dan menimbulkan perlombaan peningkatan kapabilitas militer dari sisi personel maupun peralatan perang.

Guna memudahkan akses ke pulau, fasilitas pertama yang harus ada adalah landasan pesawat terbang. Vietnam, Malaysia, Taiwan, RRT dan Filipina sudah melakukan pembangunan landasan pesawat terbang yang diperuntukkan baik bagi pesawat pengangkut barang, pesawat penjaga, jet tempur, maupun pesawat pengebom. Gambaran luas landasan pesawat terbang yang telah dibangun oleh Vietnam, Malaysia, Taiwan, RRT dan Filipina serta kapabilitas pesawat yang keluar masuk pulau yang telah direklamasi⁹, terlihat dalam gambar di bawah ini;



Sumber: amti.csis.org/airstrips-scs, dalam Yudha, 2016: 6)

Gambar 4. Luas Landasan Pesawat Terbang dan Kapabilitas Pesawat Terbang di LTS

Seiring dengan pengembangan landasan yang berlangsung, kapabilitas militer juga ikut berkembang. Perkembangan pembangunan infrastruktur dan perluasan beberapa pangkalan RRT di gugusan Spratly yang berlangsung dengan cepat antara lain di gugusan karang Mischief, Fiery Cross, Subi, Johnson, Cuarteron, Hughes dan Gaven. Pemerintah RRT telah menempatkan beberapa unit misil darat-keudara tipe HQ-9 di pulau Woody, pulau terbesar di gugusan kepulauan Paracel yang merupakan salah satu wilayah sengketa di LTS. Beberapa pangkalan antara lain di gugusan karang Fiery Cross, Mischief dan Subi telah dilengkapi dengan landasan pesawat udara, serta beberapa kapal perang RRT berlabuh di pangkalan-pangkalan tersebut.¹⁰ Sebagai gambaran, distribusi misil sebagai pengembangan kapabilitas militer RRT di Laut Tiongkok Selatan terlihat dalam gambar di bawah ini:

⁹ Sumber: Asia Maritime Transparency Initiative dalam Yudha Chandra Widya., *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.



Sumber: BBC.com, diakses pada 6 Oktober 2017

Gambar 5. Misil RRT di Kepulauan Woody, Laut Tiongkok Selatan

Penyelesaian sengketa secara damai di Laut Tiongkok Selatan sudah dilakukan sejak lama. *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) memfasilitasi negara-negara anggotanya untuk melakukan perundingan dengan Tiongkok sejak tahun 2002 dengan lahirnya *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)*. Tujuan dari deklarasi ini adalah untuk membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang bertikai dengan tiga elemen utama, yakni *self restraint, practical cooperation* dan *adoption of a Code of Conduct (CoC)*¹¹. Tahun 2004 diselenggarakan *ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DoC* yang hasilnya menyepakati untuk dilakukan pertemuan minimal dua kali dalam setahun dalam rangka menyampaikan laporan dan rekomendasi perkembangan di Laut Tiongkok Selatan melalui *ASEAN-China Senior Officials' Meeting*. Tahun 2011, kembali disepakati *Guidelines for the Implementation of the DoC* yang disusul pada tahun 2013 dalam *Special ASEAN-China Ministerial Meeting*, Indonesia mengajukan formula 3+1 sebagai dasar CoC, yakni: *promoting confidence, avoiding incidents, managing the incident (if they occur), and creating condition conducive through early harvest achievements*.

¹¹ Esensi dari *Declaration on the Conduct of parties in the South China Sea*. Naskah lengkap dari deklarasi ini dapat diakses melalui http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2, diakses pada 26 Oktober 2017.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 19-21 Oktober 2015 di Chengdu, RRT, telah disepakati beberapa hal berikut:¹²

1. Telah dimulainya pembahasan struktur dan elemen dari CoC berupa *List of Elements of the Possible Outline of a CoC* dan *List of Crucial and Complex Issues*.
2. Pembahasan pembentukan tiga komite yakni: *technical committees on transnational crime at sea, marine scientific research and environmental protection* dan *safety navigation and search and rescue*
3. Rencana pembentukan mekanisme komunikasi antar negara di kawasan dalam kondisi darurat di LTS.
4. Kemungkinan untuk mengadopsi *Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES)* dalam konteks *safety of navigation* di LTS serta memperluas cakupan CUES dengan memasukkan unsur *coast guard*.

Poros Maritim Dunia

Indonesia memiliki luas wilayah 1.922.570 km² dengan luas perairan 3.257.483 km²¹³. Dengan perairan yang begitu luas, Pemerintahan Indonesia harus memiliki orientasi pembangunan maritim yang kuat. Semangat untuk membangun wilayah maritim Pemerintahan Joko Widodo terlihat dalam petikan pidato presiden di hadapan MPR tanggal 20 Oktober 2014, berikut ini:

*"Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe. di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana."*¹⁴

¹² Chandra Widya Yudha,., *op.cit*, hlm. 17.

¹³ Lihat: <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>

¹⁴ Lihat: Endah Murniningtyas, "Prakarsa Strategis Optimalisas Pemanfaatan Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia." Ringkasan Laporan. (Jakarta: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam,

Istilah Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) digulirkan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit*) di Naypyidaw Myanmar, 13 November 2014. PMD merupakan fokus Indonesia dalam pengembangan sektor kelautan melalui pengembangan lima pilar yakni:¹⁵

1. Budaya Maritim: membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim;
2. Ekonomi Maritim: mengelola sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa;
3. Konektivitas Maritim: memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut.;
4. Diplomasi Maritim: optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim; dan
5. Keamanan Maritim: mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

Dari sisi praktis, definisi ‘Poros Maritim Dunia’ dengan lima pilarnya merupakan terobosan yang baik dalam mendesain fokus pengembangan area laut Indonesia. Hanya, dari sisi ilmiah, definisi “Poros Maritim Dunia” perlu dikaji maksud definisinya sehingga jelas dalam mendesain arah praktis. Yani & Montratama (2015) mengkaji konsep ‘poros’ dalam istilah PMD yang menelaah genealogi kata ‘poros’ dari bahasa Inggris yang mengarah pada tiga kata, yakni “*fulcrum*”, “*axis*”, dan “*nexus*”. Pertama, *fulcrum* (pusat atau sumbu) mengarah pada definisi PMD sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas kelautan dunia. Kedua, *Axis* (*alignment* atau persekutuan, aliansi) mengarah pada definisi PMD sebagai bangunan persekutuan atau aliansi yang ingin dibangun Indonesia dengan kekuatan lain di

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2016), hlm.1.

¹⁵ Yanyan M. Yani & Ian Montratama, “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik,” *Jurnal Pertahanan* 5, No. 2. (2015), hlm. 25-51.

kawasan regional yang dapat menunjang posisi strategis dan kepentingan nasional Indonesia. Ketiga, *Nexus* memaknai poros sebagai jalur perhubungan, dimana PMD menjadi visi Indonesia untuk menguasai jalur pelayaran maritim dunia.¹⁶ Mereka memilih kata *nexus* untuk padanan PMD dalam bahasa Inggris, yakni ‘Global Maritim Nexus’ untuk mengkaji PMD dari aspek geopolitik dengan asumsi bahwa lokasi geografis Indonesia yang strategis seharusnya dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menguasai posisi strategis dalam bidang kelautan dunia dengan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan kekuatan besar di kawasan.

Sependapat dengan Yani & Montratama, penulis juga memilih istilah *Global Maritim Nexus* sebagai alih bahasa dari PMD dalam bahasa Inggris dengan pertimbangan PMD diarahkan Pemerintah RI untuk memaksimalkan letak geografis Indonesia yang strategis, yakni posisi silang antara Samudera Hindia dan Pasifik serta Benua Asia dan Australia, sebagai jalur perhubungan laut dunia atau global. Membangun *nexus* maritim ini, sangat ideal sekali, jika dibangun di atas visi menjadikan Indonesia sebagai *fulcrum* atau pusat dari maritim dunia meliputi: *fulcrum* dari aspek keamanan, kenyamanan, serta keindahan alam dan keramahtamahan pelayanan. Sehingga, siapapun negara maupun non-negara yang melewati area maritim Indonesia menjadi nyaman, aman dan tenang serta senantiasa terkenang dengan segala kelebihan yang diberikan oleh area maritim Indonesia baik kelebihan alamiahnya maupun kelebihan dari sisi pelayanan.

Adapun poros sebagai persekutuan ataupun aliansi, Indonesia lebih baik bersikap independen dan fokus dalam mengelola area maritim Indonesia, meski tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai negara manapun terutama untuk pengembangan investasi dan pembangunan infrastruktur area maritim Indonesia, seperti pembangunan tol laut.

Namun perlu diperhatikan agar kerja sama yang dibangun Pemerintah Indonesia ditujukan dalam rangka memberikan kemaslahatan untuk rakyat Indonesia, bukan terjebak dalam pertarungan sandiwara lanjutan Perang Dingin, misalnya cenderung untuk bekerja sama dengan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

Tiongkok dengan mengabaikan tawaran-tawaran Amerika dan sekutunya, ataupun sebaliknya.

Dalam Poros Maritim Dunia, objek atau sasaran pengembangan adalah bidang budaya dan ekonomi. Pengembangan kedua aspek ini dilakukan dengan membangun koneksi. Caranya melalui diplomasi baik diplomasi ke dalam maupun ke luar dengan mengedepankan *soft power* Indonesia. Jaminan agar kedua aspek dapat berkembang dengan baik adalah dengan memberikan keamanan bagi semua pihak yang memanfaatkan area maritim Indonesia. *Hard power* menjadi andalan dalam masalah keamanan maritim ini.

Esensi dari pengembangan budaya maritim adalah redefinisi atau pendefinisian kembali identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang mana dari aspek kesejarahan Indonesia pernah menjadi entitas politik yang besar yang menguasai lautan luas di bawah kerajaan Sriwijaya (abad 8) dan Majapahit (abad 15). Pada masa itu, kedua kerajaan mampu menjaga keamanan maritim sehingga arus perdagangan yang melintasi laut wilayahnya menjadi berkembang pesat. Kini, identitas nasional bangsa Indonesia sebagai negara maritim memang harus dibangun kembali seiring dengan terkikisnya rasa kebanggaan terhadap bangsa. Namun, pengembangan budaya maritim ini jangan sampai melupakan bahwa Indonesia itu adalah juga negara agraris.

Rakyat Indonesia hidup di darat, tidak terapung-apung di lautan. Makanan pokok rakyat Indonesia pun tumbuh di darat. Rumah, apartemen, hotel, jalan, kebun, sawah semua itu ada di daratan. Sehingga, orientasi Pemerintah untuk mengembangkan budaya maritim harus pula diseimbangkan dengan kebutuhan harian rakyat yang hidup dan mencari penghidupan di darat. Orientasi pembangunan maritim dan darat jika diperbandingkan berkisar dua berbanding satu. Jika pemerintah abai dengan pembangunan agraris, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan dalam stabilitas ketersediaan bahan makanan pokok, ataupun stabilitas industri yang menghasilkan barang-barang sekunder dan tersier.

Pembangunan agraris yang berfokus pada pembangunan di darat merupakan patok tumbuh dan berkembangnya Indonesia. Harus dijaga agar patok tersebut tidak terserabut dari

tanah. Fokus penjagaan stabilitas ini memiliki range ruang lingkup. Jika pembangunan di darat itu berada dalam *range* inti atau pertama, pengembangan maritim berada di lapis atau *range* kedua yang menjaga stabilitas. Sehingga, pengembangan budaya maritim memiliki fungsi yang tidak mudah.

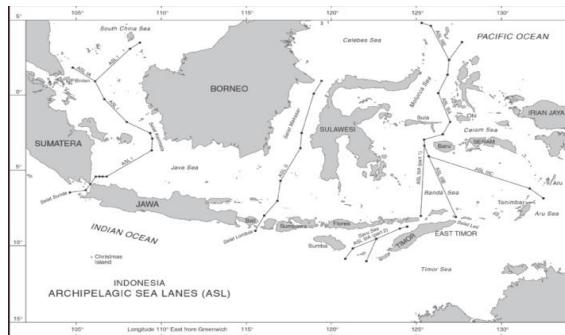
Pertama, pengembangan budaya maritim berupa eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam di lautan yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi maritim dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pelestarian sumber daya maritim bangsa ini harus bersifat pembangunan berkelanjutan. Dalam arti, pemanfaatannya harus memperhatikan ketersediaan sumber daya itu bagi generasi bangsa ini dimasa yang akan datang.

Yang menjadi tantangannya adalah, pihak-pihak yang hidup dari laut Indonesia bukan hanya nelayan atau rakyat Indonesia saja. Tetapi juga bangsa lain, yang mana, sebelum Indonesia merdeka sebagai sebuah negara-bangsa (*Nation-state*) nelayan asing secara turun temurun melakukan penangkapan ikan di lautan nusantara. Wilayah Nusantara yang menjadi teritori Indonesia di masa ini, baik daratan maupun lautan, merupakan daerah yang memberikan kehidupan bagi banyak bangsa sebelum era Westphalia. Bangsa Tiongkok, bangsa India, bangsa Afrika, terutama bangsa Eropa dalam masa kolonial, peradaban mereka tumbuh dan besar karena dukungan alam Nusantara, karena mengeksplorasi sumber daya alam nusantara. Interaksi kemaritiman tersebut telah dilakukan pula sejak periode kerajaan-kerajaan di Nusantara:

Beberapa kerajaan Nusantara dengan kultur peradaban maritim antara lain Kerajaan Kutai (abad ke-4), Sriwijaya (tahun 600an-1000an), Majapahit (1293-1500), Ternate (1257-sekarang), Samudera Pasai (1267-1521), dan Demak (1475-1548). Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tercatat sebagai kerajaan-kerajaan Nusantara yang pada zaman keemasannya menjadi adidaya karena karakter kemaritiman yang tertanam pada masyarakat... Sejak Kerajaan Kutai, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan laut untuk aktivitas perdagangan dan pelayaran. Dengan teknologi yang ada saat itu, para penduduk melakukan kegiatan niaga antar pulau, kerajaan, bahkan

berlayar hingga pulau yang jauh seperti Sri Lanka dan Madagascar...¹⁷

Pada saat Indonesia diproklamasikan sebagai sebuah negara bangsa dengan wilayah teritori tertentu, bangsa-bangsa lain yang sudah merasakan nikmatnya bumi nusantara menjadi kesulitan untuk melakukan eksploitasi alam secara bebas karena ada hukum nasional yang diberlakukan oleh rakyat Indonesia melalui pemerintah yang berkuasa. Mereka tentu akan menuntut akses untuk masuk dan memanfaatkan bumi nusantara. Deklarasi Juanda yang diterapkan dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) terutama untuk negara-negara Archipelago, tidak serta-merta dituruti langsung oleh bangsa-bangsa lain. Dalam masalah hukum, mereka menuntut akses atas wilayah Indonesia sehingga pemerintah Indonesia membuka akses untuk pelayaran internasional dalam skema Alur Laut Kepulauan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan ALKI. Dengan dibukanya ALKI, Pemerintah Indonesia jelas harus waspada dengan segala infiltrasi yang dapat mengacaukan stabilitas domestik.



Sumber: Marsetio. "Manajemen Strategis Negara Maritim dalam Perspektif Ekonomi dan Pertahanan." *Orasi Ilmiah Wisuda ke XXVI Program Pasca Sarjana STIMA IMMI*. (Jakarta: Taman Mini Indonesia Indah, 2014), hlm. 10.

Gambar 6. ALKI dan Choke Point Dunia di Perairan Indonesia

Kedua, pengembangan budaya maritim berfungsi sebagai media atau sarana distribusi produk-produk barang ataupun jasa yang dihasilkan dalam produksi di darat. Fungsi konektivitas menonjol di sini. Misalnya, distribusi makanan pokok dari daerah yang surplus ke daerah yang kekurangan. Pelabuhan-

¹⁷ Sahat Martin Philip Sinurat, "Berikut Catatan tentang Kerajaan Maritim Nusantara," 29 Maret 2016. <http://maritimnews.com>, diakses pada 6 Agustus 2017.

pelabuhan Indonesia harus dibangun sedemikian rupa sehingga fasilitas di pelabuhan tersebut mampu mempermudah distribusi produk barang dan jasa yang dihasilkan di daratan baik untuk distribusi antar pulau dalam level nasional Indonesia maupun untuk distribusi ekspor. Aspek administrasi keimigrasian yang bertele-tele harus dipangkas seminimal mungkin dengan tetap mengindahkan aspek keamanan untuk menghindari penyelundupan barang-barang yang membahayakan.

Ketiga, konektivitas maritim berfungsi untuk mempermudah akses antar pulau di Indonesia yang meliputi wilayah yang luas sekali. Tol laut menjadi ide yang menarik. Sebanyak 24 pelabuhan sedang dikembangkan oleh Presiden Joko Widodo yang terdiri atas tipe pelabuhan hubungan internasional, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Pelabuhan-pelabuhan tersebut di antaranya: Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasing, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura. Nilai investasi pengembangan 24 pelabuhan tersebut mencapai 39,5 trilyun rupiah dengan investasi pengadaan kapal senilai 53,15 trilyun rupiah. Gambaran dari desain pengembangan konektivitas maritim terlihat dalam gambar di bawah ini:



Sumber: www.finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2752292, diakses pada 27 September 2016

Gambar 7. Gambaran Pengembangan Konektivitas Maritim

Keamanan yang mengedepankan *hard power* dalam pertahanan dan keamanan area maritim Indonesia menjadi pelindung di lapangan manakala hasil diplomasi yang tertuang dalam serangkaian kesepakatan, kadangkala, kurang bergigi ketika diterapkan di lapangan. Selain aktif mengembangkan diplomasi maritim, Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya membangun kekuatan militer yang difokuskan untuk menjaga area maritim dengan titik tekan membangun kekuatan angkatan laut. Strategi Angkatan Laut Indonesia untuk mendukung PMD adalah *World Class Navy*, yakni TNI Angkatan Laut yang mampu menghadirkan kekuatannya di berbagai penjuru dunia yang memiliki karakter unggul sebagai berikut:¹⁸

1. Sumber daya manusia yang unggul, yakni personel yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi untuk memberikan kontribusi dalam meuwujudkan visi organisasi Angkatan Laut RI, khususnya dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia.
2. Unggul organisasi, dimana organisasi TNI Angkatan Laut Indonesia memiliki kualitas yang handal, solid, efektif dan efisien dalam kinerjanya.
3. Unggul kemampuan operasional, yakni Angkatan Laut RI memiliki kinerja yang responsif, efektif dan multiguna yang didukung kesiapan peralatan dan teknologi. intelijen yang akurat, logistik yang memadai, personel yang tangguh, serta kemampuan komando dan kendali yang handal dalam melaksanakan operasi militer.
4. Unggul teknologi dimana Angkatan Laut RI memiliki kapabilitas teknologi yang mumpuni karena tingginya tingkat melek teknologi ini akan berpengaruh terhadap doktrin, strategi, operasional, maupun taktik penggunaan kekuatan angkatan laut dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya.

Desain Poros Maritim untuk Menghadapi Tantangan Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Sikap agresif Tiongkok, pun negara-negara anggota ASEAN yang terlibat sengketa di Laut Tiongkok Selatan harus diwaspadai sebagai sebuah ancaman bagi teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua ancaman utama yang hadir dari LTS adalah reklamasi dan perlombaan kapabilitas militer. Kedua ancaman tersebut harus dianggap serius karena terkait dengan doktrin geopolitik yang ditanamkan secara turun temurun dan juga kemungkinan penolakan hukum laut internasional dan putusan-putusan Mahkamah Arbitrase Internasional karena bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa.

Selain ancaman dari Laut Tiongkok Selatan, alur ALKI pun harus diwaspadai sebagai jalur masuk ancaman asing ke dalam wilayah laut indonesia yang luas. Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa:¹⁹

1. Penyelundupan barang-barang ilegal dari negara lain yang akan sangat merugikan pemerintah Indonesia dari sisi pajak;
2. Peredaran narkoba yang dikhawatirkan akan merusak generasi bangsa Indonesia.
3. Penyeludupan senjata oleh kelompok-kelompok teroris dan separatis yang mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.
4. Sengketa perbatasan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, dan kini dengan Pemerintahan RRT terkait insiden di Natuna. Empat titik penting akses masuk dunia ke wilayah maritim Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makasar, dan Selat Lombok.
5. Pencurian ikan yang dilakukan nelayan-nelayan asing baik dengan kapal-kapal kecil maupun kapal-kapal besar.
6. Perusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pencurian ikan dengan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan seperti pukat harimau dan bahan peledak.

¹⁸ Ade Supandi, "Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," *Jurnal Pertahanan* 5, No. 2. (2015), hlm. 1-51.

¹⁹ Andi Yudhistira, "Over-The-Horizon Radar (OTHR) untuk Menjaga Wilayah Udara dan Laut Indonesia," *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2. (2015), hlm.138-139.

Sinaga (2011) menguraikan ancaman terhadap ALKI dari masing-masing alur sebagai berikut²⁰:

1. ALKI 1 potensi ancaman muncul dari Laut Tiongkok Selatan atas kepulauan Spratly dan Paracel, perampokan dan penyelundupan barang ilegal dan perdagangan manusia di Selat Malaka, serta ancaman tsunami di Selat Sunda dan erupsi gunung berapi;
2. ALKI 2, potensi ancaman konflik dari Blok Ambalat, penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, terorisme sebagai imbas dari Bali sebagai pusat pariwisata dunia; dan
3. Potensi ancaman berasal dari bagian utara konflik internal di Filipina bagian selatan dari Timor Leste, pergerakan separatisme Republik Maluku Selatan di Maluku dan Papua Merdeka di Papua, serta masalah perbatasan dengan Australia.

Dalam menghadapi ancaman secara umum sebagai ekses dari ALKI dan ancaman dari sengketa Laut Tiongkok Selatan, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan strategi *outward-looking* dalam menghadapi tantangan LTS. Pertama, melakukan deteksi dini bagi pihak-pihak yang menyusup secara ilegal pada area maritim Indonesia, baik nelayan asing, terlebih lagi pesawat atau kapal militer asing yang melakukan kegiatan spionase atau aksi militer. Dalam rangka deteksi dini ini,²¹ menyarankan penggunaan radar *Over-The-Horizon-Radar (OTHR)* untuk mendeteksi dan mengawasi wilayah udara dan laut secara bersamaan. Menurut Yudhistira, seluruh wilayah Indonesia dapat diawasi dengan hanya 4 radar yang diletakkan di Mataram, Manado, Palu dan Balikpapan. Radar yang diletakkan di Mataram dapat mengawasi wilayah Indonesia bagian selatan. Radar yang diletakkan di Manado mengawasi wilayah utara. Radar yang diletakkan di Palu akan mengawasi wilayah Barat dan radar yang diletakkan di Balikpapan mengawasi wilayah Timur.

²⁰ Lidya Christin Sinaga, "Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia II", 10 Maret 2011. www.politik.lipi.go.id, diakses pada 6 Oktober 2017.

²¹ Andi Yudhistira, *op.cit.*, hlm.145-147.

Kedua, integrasi kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia dari segala kekuatan baik pertahanan sipil, kepolisian, dan tentara (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) dengan strategi pertahanan berlapis (*layered defence strategy*). Yakni, konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan antara lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan non militer (sipil) dengan tujuan mengatasi dan menanggulangi ancaman militer dan non-militer, serta untuk tujuan menghadapi perang berlarut.²² Lapis pertama, pengamanan domestik menjadi inti untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dimana ujung tombak penjaga keamanannya berada di tangan Kepolisian dan Tentara Angkatan Darat. Keamanan ini meliputi keamanan di dalam pulau dan antar pulau. Lapis kedua adalah pengamanan perbatasan dari pulau-pulau terluar. Kolaborasi antara angkatan darat, laut, dan udara diperlukan di sini. Pulau-pulau terluar dapat dijaga oleh tentara dengan sistem pos. layaknya sistem benteng stelsel yang digunakan Belanda jaman dahulu untuk memecah strategi perang gerilya bangsa Indonesia, sistem tersebut dapat digunakan oleh tentara Indonesia untuk membentuk pos-pos sebagai titik-titik pengamanan untuk memudahkan koordinasi strategi di lapangan. Angkatan Laut diperlukan selain menjaga perbatasan juga patroli antar pulau. Lapis ketiga adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimana kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara RI sangat diperlukan dalam merespon infiltrasi-infiltrasi asing yang memasuki area maritim Indonesia. Dalam menghadapi tantangan Laut Tiongkok Selatan, strategi pertahanan untuk menangkal ancaman dari luar kekuatan lini pertama (*first line*) adalah Angkatan Udara disusul Angkatan Laut di Lini kedua (*second line*). Angkatan Udara akan mengirim jet-jet tempur untuk menghadang musuh, baru kemudian kekuatan angkatan Laut bersiaga untuk menyerang dan melindungi NKRI. Strategi pertahanan Laut Tentara Angkatan Laut terdiri dari tiga pilar yakni:²³

²² Jerry Indrawan, "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia dari Pertahanan Teritorial menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan," *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2. (2015), hlm.. 104-105.

²³ Jerry Indrawan., *Ibid.*, hlm.104.

1. Melakukan upaya penangkalan sejak di pangkalan
2. Menghancurkan musuh di luar batas laut nasional, yakni di daerah:
 - a. Medan Pertahanan Penyangga yang berada di luar garis batas ZEE Indonesia dan lapisan udara di atasnya
 - b. Medan Pertahanan Utama, sejak dari batas luar laut teritorial sampai dengan ZEE Indonesia dan lapisan udara di atasnya
 - c. Medan Perlawanan, yakni daerah laut teritorial dan perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya.
3. Bila musuh tetap tidak terbendung, maka mereka akan dihancurkan di daratan. Namun, tahap ketiga ini sebisa mungkin dihindari untuk meminimalisir jatuhnya korban sipil yang terlalu banyak.

Ketiga, menggenjot diplomasi secara bilateral, regional maupun multilateral. Di dalam fora multilateral, Pemerintah Indonesia harus terus aktif menyuarakan (*sounding*) bahwa klaim *Nine dash Line* Pemerintah RRT terlalu berlebihan dan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dalam level regional, Pemerintah Indonesia aktif mendukung ASEAN sebagai penjaga stabilitas keamanan dan perekonomian regional, pun menjadi sarana mediasi dalam penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Arahan untuk membuat *Code of Conduct* (CoC) di LTS harus terus diupayakan, meski Pemerintah RRT menyatakan bahwa DoC yang tujuannya adalah membentuk CoC, merupakan kesepakatan RRT dengan ASEAN yang tidak mengikat secara hukum. Secara bilateral, Pemerintah Indonesia juga terus meyakinkan Pemerintah RRT bahwa klaim area perikanan tradisional yang diklaim RRT tidak ada dasar hukumnya dalam klausula Hukum Laut Internasional. Meski demikian, Indonesia pun menyadari bahwa klaim wilayah merupakan kepentingan nasional abadi suatu negara yang akan diupayakan oleh negara tersebut selamanya. Namun, dalam pelaksanaan kepentingan nasional tersebut sangat tergantung pada rezim pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu, pendekatan yang intens terhadap Pemerintah RRT harus terus dilakukan agar

RRT mampu mengurangi aktivitas mereka di Laut Tiongkok Selatan.

Keempat, membangun *balance of power* (penyeimbang kekuatan) di Laut Tiongkok Selatan guna mengantisipasi kompleksitas keamanan (*security complex*) yang berlangsung di area tersebut. Kompleksitas keamanan berlangsung di antara negara-negara yang mengajukan klaim teritori atas pulau-pulau serta area lautnya. Karakter keamanannya bersifat rivalitas dan kompetisi dalam hal pemanfaatan pulau dan penggunaan kekuatan militer. kepentingan bersama yang ingin dibangun oleh negara-negara yang bersengketa, yang notabene adalah ‘‘tetangga’’, adalah adanya pakem atau panduan bersama dalam bentuk *Code of Conduct* untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan apalagi aksi militer karena jika sampai terjadi perang di regional Laut Tiongkok Selatan pihak yang terlibat, pada dasarnya, akan sama-sama dirugikan. Desain ikatan *amity* (persahabatan) berlangsung di antara beberapa negara-negara anggota ASEAN (seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei) versus RRT sebagai *enmity* (permusuhan). Dalam hal ini, RRT menjadi *common enemy* bagi negara-negara ASEAN. Namun, karena power RRT lebih besar dibandingkan dengan koalisi negara-negara anggota ASEAN, baik dari sisi kapabilitas militer, ekonomi dan kuatnya doktrin Zengmu Ansha yang menjadi motivasi rakyat dan Pemerintah RRT untuk memperjuangkan klaim wilayah perairan penangkapan ikan tradisional mereka, negara-negara anggota ASEAN merasa perlu mengembangkan aliansi yang mana hal ini sudah dilakukan secara bilateral oleh setiap negara anggota ASEAN yang terlibat sengketa. Sudirman (2016) memandang Amerika Serikat (AS) dapat memainkan peran sebagai penyeimbang kekuatan RRT di Laut Tiongkok Selatan dengan pertimbangan opsi melibatkan AS dalam rangka menjaga stabilitas keamanan LTS dimana AS memiliki kepentingan terhadap arus kargo perdagangan LNG miliknya yang melewati LTS sebesar US\$1,2 trilyun. Meski demikian, prinsip no free lunch harus menjadi dasar negara-negara anggota ASEAN untuk senantiasa waspada terhadap eksistensi kekuatan asing dalam area regional Asia Tenggara.

Penutup

Kompleksitas keamanan yang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan terkait dengan isu reklamasi pulau dan perlombaan kapabilitas militer sebagai fokus sengketa keamanan dengan melibatkan pemerintah negara-negara RRT, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia, serta Amerika Serikat yang diharapkan mampu memainkan peran sebagai penyeimbang kekuatan. Taiwan melakukan reklamasi namun karena posisinya diluar area maritim Indonesia, Pemerintah dapat menganggap aktivitas Taiwan di LTS merupakan masalah pribadi antara Taiwan dengan RRT. Indonesia tidak melakukan reklamasi, namun jika pemerintah tidak hirau dengan sengketa LTS, klaim RRT terutama dapat mengikis area yurisdiksi NKRI melalui Kepulauan Natuna.

Strategi *outward looking* dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* memberikan kesimpulan dalam empat hal, yakni:

1. Perlunya melakukan deteksi dini terhadap pihak-pihak yang melakukan infiltrasi ke dalam area maritim Indonesia. Teknologi *Over-The-Horizon-Radar (OTHR)* dapat digunakan untuk mendeteksi area laut sekaligus udara wilayah Indonesia.
2. Integrasi kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia meliputi kekuatan polisi, dan tentara (angkatan darat, laut dan udara) menjaga stabilitas keamanan domestik sebagai lapisan inti, menjaga perbatasan sebagai lapis kedua, dan menjaga area ZEE sebagai lapis ketiga atau terluar wilayah Indonesia.
3. Terus melakukan upaya diplomasi mulai dari level bilateral, regional hingga multilateral.
4. Membangun penyeimbang kekuatan di Laut Tiongkok Selatan dengan memperkuat *amity* di antara negara-negara anggota ASEAN dan meningkatkan peran AS sebagai penyeimbang kekuatan RRT dengan tetap membatasi peran AS tersebut sebagai sikap siaga dari negara-negara ASEAN terhadap eksistensi kekuatan asing di kawasan.

Sebagai penutup, penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk mengembangkan strategi *outward-looking* dalam menghadapi tantangan reklamasi dan perlombaan kapabilitas militer yang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan dengan melibatkan seluruh kekuatan komponen pertahanan dan keamanan Indonesia baik, dari sisi sumberdaya manusia, teknologi, maupun sarana dan prasarana. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan teknologi OTHR, mengintegrasikan kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia, melakukan diplomasi mengenai isu keamanan maritim, serta membangun penyeimbang kekuatan di Laut Tiongkok Selatan.

Daftar Pustaka

Buku

Bunyavejchewin, Poowin. *A Regional Security Complex Analysis of the Preah Vihear Temple Conflict 1953-1962*. Thailand: Walailak University. 2013.

Buzan, Barry. *People, State and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Colchester: ECPR Press. 2007.

Heryadi, Dudy, dkk. *Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan*. Laporan Akhir Penelitian Kelompok FISIP UNPAD. Jatinangor: FISIP UNPAD. 2012.

Yudha, Chandra Widya. *Implementasi DoC dan Perundingan CoC di Laut Tiongkok Selatan*. Jakarta: Direktorat Politik dan keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI. 2016.

Jurnal

Indrawan, Jerry. "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia dari Pertahanan Teritorial menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan," *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2. (2015): 93-113.

Marsetio. "Manajemen Strategis Negara Maritim dalam Perspektif Ekonomi dan Pertahanan." *Orasi Ilmiah Wisuda ke XXVI Program Pasca Sarjana STIMA IMMI*. Jakarta: Taman Mini Indonesia Indah, 2014.

- Sudirman, Arfin. "Ujian Sentralitas ASEAN di Laut Tiongkok Selatan," *Kompas*. 2016.
- Supandi, Ade. "Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," *Jurnal Pertahanan* 5, No. 2. (2015): 1-51.
- Yani, Yanyan M & Montratama, Ian. "Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik," *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2. (2015): 25-51.
- Yudhistira, Andi. "Over-The-Horizon Radar (OTHR) untuk Menjaga Wilayah Udara dan Laut Indonesia," *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2. (2015): 133-148.

Dokumen

Murniningtyas, Endah. *Prakarsa Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Ringkasan Laporan. Jakarta: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2016.

Dokumen UNCLOS 1982

Sumber Lainnya

- Sinaga, Lidya Christin. "Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia II", 10 Maret 2011, www.politik.lipi.go.id,
- Sinurat, Sahat Martin Philip. "Berikut Catatan tentang Kerajaan Maritim Nusantara," 29 Maret 2016, <http://maritimnews.com>, www.thediplomat.com, diakses 27 September 2016
- www.newshanter.com, diakses 24 Agustus 2016
- www.dunia.news.viva.co.id, diakses 27 September 2016
- www.m.merdeka.com, diakses 27 September 2016
- www.finance.detik.com, diakses 27 September 2016
- <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surat>Show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: "Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?", "Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua," "Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD)," dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: aisahputrib@gmail.com.

Atika Nur Kusumaningtyas

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik – LIPI yang fokus menganalisis statistik untuk bidang ilmu politik. Gelar sarjana statistik dan master statistik diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini turut aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan tema kajian perempuan dan politik. Dapat dihubungi melalui email: atika.nur.k@gmail.com

Deasy Silvya Sari

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung. Ia memperoleh Gelar master dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2013. Ia menekuni studi hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

Diandra Megaputri Mengko

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2010, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Parahyangan Bandung. Selanjutnya menamatkan pendidikan master di Universitas Pertahanan pada tahun 2012. Pernah menjadi Peneliti pada Indonesia Center For Diplomacy, Democracy and Defense. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi pertahanan dan keamanan. Penulis dapat dihubungi melalui email: diandramengko@yahoo.com

Firman Noor

Penulis merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Fokus kajian peneliti yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, ketewakilan politik, dan pemikiran politik. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, dia menyempatkan diri untuk mengajar pada Departemen Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Memperoleh Gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada saat kuliah di ANU dia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award sebagai mahasiswa dengan nilai terbaik di fakultasnya pada tahun 2007. Melanjutkan Studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendibud. Studi S-3 ditempuhnya dengan relatif singkat (2,5 tahun) dengan disertasi berjudul Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post Soeharto Era (1998-2008). Tulisannya

telah pula tersebar di sejumlah jurnal ilmiah dan media cetak nasional seperti Republika, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas dan the Jakarta Post. Dapat dihubungi melalui email: f.noor7676@gmail.com

Gede Dwitya Arief Metera

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University Amerika Serikat. Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Bahasa Inggris di dan Master bidang kajian religi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pernah mengikuti Graduate Fellow di Asian Research Institute, National University of Singapore dan menjadi peneliti tamu di Pusat Penelitian Politik LIPI. Dapat dihubungi melalui email : gdemetera2018@u.northwestern.edu

Ismah Rustam

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Beliau memperoleh gelar sarjana hubungan internasional dari universitas mataram dan memperoleh Gelar master dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Ia menekuni kajian hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email : ismah09@yahoo.com

Novie Lucky Andriyani

Penulis adalah alumni pasca sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan memperoleh Gelar sarjana dari Universitas Negeri Surabaya. Ia menekuni studi hubungan internasional dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

Sarah Nuraini Siregar

Penulis lahir di Jakarta, 30 April 1980 dan menetap di Jakarta. Sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

Sri Yanuarti

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat di buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Bila ABRI Menghendaki, Menata Negara, Pemilu 99 dan Kekerasan Politik, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, dan lain-lain. Studi yang diminati adalah bidang politik domestik, khususnya berkaitan dengan kajian politik-militer. Dapat dihubungi melalui email: yanuc2000@yahoo.com

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Penulis lahir di Yogyakarta, Indonesia tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia dengan fokus kajian Hukum Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional. Bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Pernah menulis buku dengan judul War Crime in International and National Law Perspectives tahun 2012 yang diterbitkan Rajawali Grasindo. Pernah diundang sebagai visiting scholar at Flinders Law School, Adelaide, Australia (2010 dan 2013) dan sebagai peneliti tamu di Norwegian Center for Human Rights, Oslo University, Norway tahun 2009. Beliau aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang persoalan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: trihoni@unika.ac.id

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

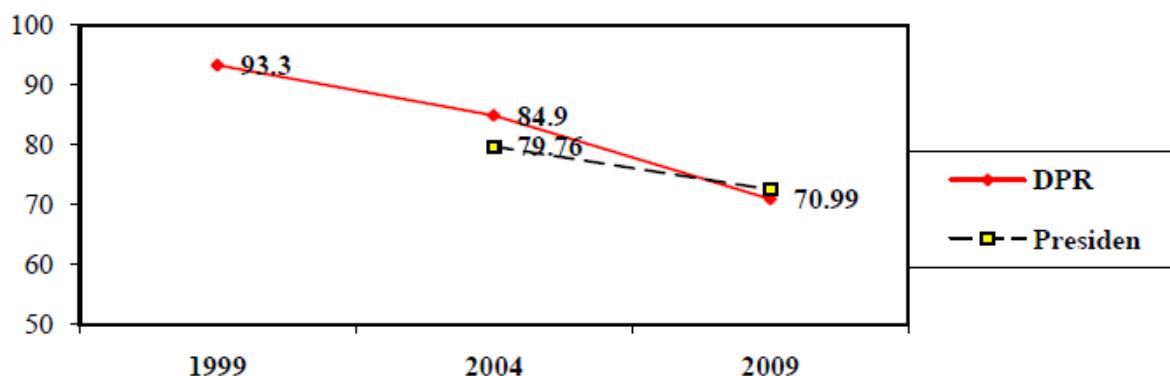
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemanfaatan kepengurusan partai hingga level terendah	Pemanfaatan soliditas elite partai pada level DPP
	Sosialisasi agenda politik	Pemanfaatan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan dukungan masyarakat	Penajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:

Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
 - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
 - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. **Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nonor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. **Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. **Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (italic), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. **Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan.2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M.Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institutue.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (penerbitan.p2p@gmail.com).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-jurnal dengan alamat <http://ejurnal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

